

---

**PERPUSTAKAAN SEBAGAI RUANG PUBLIK  
(PERSPEKTIF HABERMASIAN)**

Oleh  
**Luh Putu Sri Ariyani\*)**

**Abstract**

Perpustakaan memiliki peranan yang sangat penting dalam perjalanan demokrasi. Perpustakaan merupakan kunci bagi penyediaan akses kepada pengetahuan, informasi dan ide-ide kepada setiap warganya dengan setara, sehingga setiap orang akan bisa memiliki modal kultural dengan memanfaatkan perpustakaan. Peran perpustakaan dalam demokrasi memiliki fungsi pendidikan, fungsi sosial dan fungsi politik. Pada fungsi ini melekat peran perpustakaan sebagai penyedia informasi yang tidak biasa, yang mendasarkan pluralisme atau keragaman sebagai landasan utama demokrasi. Dengan tersedia dan teraksesnya informasi secara utuh, masyarakat akan memiliki informasi yang cukup yang tidak saja berguna untuk mengambil keputusan, bahkan untuk mengontrol proses pembentukan kebijakan. Tulisan ini akan membahas tentang usaha perpustakaan dalam menyediakan informasi agar terwujud ruang publik dalam perspektif J urgen Habermas.

**Kata kunci:** perpustakaan, demokrasi, ruang publik, J urgen Habermas.

**1. PENDAHULUAN**

Dilihat dari jumlah penduduknya, Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Pemilihan umum nasional, sebagai sarana bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya, secara rutin diselenggarakan setiap lima tahun sekali untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD dan Presiden serta Wakilnya. Bahkan, yang tidak kalah membanggakan, sistem demokrasi ini juga diselenggarakan untuk memilih para wakil rakyat di daerah.

Meskipun secara prosedural membanggakan, namun tidak dapat

dipungkiri sistem perpolitikan Indonesia masih menyisakan berbagai persoalan. Kekerasan, politik uang, nepotisme, dan lain-lain merupakan noktah-noktah buram pengotor aspirasi masyarakat yang terjadi hampir di setiap perhelatan demokrasi di Indonesia. Beberapa kasus yang hangat diberitakan media adalah adanya dugaan pemanfaatan birokrasi dan politik uang (baca: suap) untuk memenangkan pasangan pemimpin daerah tertentu atau wakil rakyat.

Kondisi ini menjadikan perpolitikan Indonesia hanya dapat

diakses oleh sekelompok masyarakat yang memiliki kelebihan modal. Modal ini dapat berupa modal finansial (kekayaan), modal kultural (gelar akademik, gelar kebangsawanan), modal sosial (jaringan sosial), dan modal simbolik (kehormatan dan prestise di masyarakat) (Ritzer dan Goodman, 2004: 526-527; Takwin, 2005: xx; Fashri, 2007: x; Mutahir, 2011). Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan jika pada saat ini pemimpin yang lahir dari sistem perpolitikan Indonesia umumnya berasal dari kaum kaya, memiliki jaringan yang luas, berasal dari keluarga yang berpengaruh, memiliki gelar akademis yang mentereng, dan sebagainya.

Kehadiran penguasa model ini dapat merugikan masyarakat karena setelah terpilih mereka akan cenderung untuk mempergunakan kekuasaannya untuk mengakumulasi kepemilikan modal yang telah dimilikinya. Jika ini terjadi, bukannya tidak mungkin kebijakan yang disusunnya akan bertujuan memperkaya diri sendiri (akumulasi kepemilikan modal finansial), memperkaya orang lain (akumulasi modal sosial), banyak melakukan kebijakan-kebijakan yang seolah-olah berpihak kepada rakyat

(akumulasi modal simbolik), dan lain-lain.

Berbagai masalah yang membelit sistem pemilihan di Indonesia menjadikan sistem ini hanya memberikan legitimasi bagi kekuasaan namun belum dapat mencerminkan aspirasi masyarakat secara murni. Kondisi inilah yang disebut oleh Habermas sebagai kekuasaan yang irasional (Hardiman, 2009). Rasionalisasi kekuasaan hanya dapat terjadi jika setiap orang dapat menyalurkan aspirasinya secara setara tanpa melihat logika-logika modal yang melatarbelakanginya.

Terciptanya sebuah kekuasaan yang rasional ini menurut Habermas tidak dapat dipisahkan dari keberadaan ruang publik. Habermas menyatakan bahwa ruang publik merupakan “semua wilayah kehidupan sosial kita yang memungkinkan kita untuk membentuk opini publik” (Hardiman, 2009: 151). Definisi ini menjadikan ruang publik dapat berupa sebuah ruang abstrak maupun ruang fisik yang menjadi ajang pembentukan pendapat anggota-anggota masyarakat di luar kendali pemerintah. Pada setiap ruang publik masyarakat memiliki hak dan kemampuan untuk berdebat, bersepakat dan berkeputusan tentang hal-hal penting yang menyangkut

diri mereka (Pendit, 2007). Ruang publik diharapkan mampu menjadi ruang komunikasi para warganegara untuk menciptakan keadaan negara yang demokratis dan independen.

Perpustakaan sebagai lembaga penyedia informasi memiliki peranan yang sangat penting dalam perjalanan demokrasi. Dalam hal ini perpustakaan mampu mendemokratisasi pengetahuan. Perpustakaan merupakan kunci bagi penyediaan akses kepada pengetahuan, informasi dan ide-ide kepada setiap warganya dengan setara, sehingga setiap orang akan bisa memiliki modal kultural dengan memanfaatkan perpustakaan. Rosch dalam Asmini (2009) menyebutkan pentingnya peran perpustakaan dalam demokrasi dengan membaginya menjadi beberapa fungsi yaitu; *pertama*, fungsi pendidikan yang mencakup pendidikan secara umum, pendidikan dalam bentuk pelatihan dan keberaksaraan atau keberaksaraan informasi. Fungsi *kedua* adalah fungsi sosial yang mencakup pelibatan minoritas, dan mendorong emansipasi dari strata sosial yang lemah. Fungsi yang *ketiga* adalah fungsi politik perpustakaan. Fungsi yang sangat terkait langsung dengan era demokrasi dan secara

kontekstual sangat bersesuaian dengan kondisi Indonesia saat ini. Pada fungsi ini melekat peran perpustakaan sebagai penyedia informasi yang tidak biasa, yang mendasarkan pluralisme atau keragaman sebagai landasan utama demokrasi. Dengan demikian, perpustakaan seharusnya menjamin tersediannya keragaman pendapat, sehingga tidak satu entitas pun dapat menyatakan dirinya sebagai pemegang kebenaran sejati. Pada fungsi ini pula perpustakaan diharapkan mampu menjamin terdorongnya partisipasi politik warga negara dengan penyediaan akses informasi sebagai hak dasar dan kebebasan berekspresi. Dengan tersedia dan teraksesnya informasi secara utuh, masyarakat akan memiliki informasi yang cukup yang tidak saja berguna untuk mengambil keputusan, bahkan untuk mengontrol proses pembentukan kebijakan. Penyediaan akses informasi akan mampu menyuburkan nilai-nilai transparansi dan anti korupsi sehingga tercipta pemerintahan yang terbuka, yang berujung pada terselenggaranya tata pemerintahan yang baik.

Perpustakaan dengan fungsi-fungsi yang dipaparkan di atas memiliki konsep yang hampir sama dengan konsep ruang

publik baik secara fisik sebagai tempat berkumpulnya orang-orang secara setara dan independen, maupun secara abstrak menyediakan informasi sebagai hak dasar masyarakat. Lalu bagaimanakah usaha perpustakaan dalam menyediakan

informasi agar terwujud ruang publik dalam perspektif Jurgen Habermas?

## 2. PEMBAHASAN

### 2.1. Konsep ruang publik

Kata ‘publik’ (*public*) berasal dari bahasa latin yaitu ‘*publicus*’. Dalam masyarakat Romawi kuno, kata *publicus* memiliki dua arti: (1). Milik rakyat sebagai satuan politis atau milik negara; (2) sesuai dengan rakyat sebagai seluruh penduduk atau kata lain untuk ‘umum’. Di dalam konsep tersebut tersirat dua hal yaitu suatu ruang tempat hal-hal umum dibicarakan dan suatu subjek hukum, yakni rakyat suatu negara.

Pada jaman Yunani Romawi *publicus* mengandung arti terkait kekuasaan para pejabat negara. Para pejabat negara dan para pemimpin agama termasuk ke dalam status publik yang dalam hal ini dibedakan dari orang-rang privat yang bertindak bukan untuk kepentingan umum, misalnya pedagang. Dalam masyarakat Eropa Abad Pertengahan pemaknaan kata *publicus*

tidak banyak bergeser dari jaman Yunani dan Romawi kuno. Namun terdapat beberapa nuansa baru karena hukum kanonik Gereja Katolik mengembangkan banyak distingsi yang penting seperti, *publicus* dan *privatus* dihubungkan dengan antinomi antara ‘duniawi’ dan ‘gerejawi’, suatu distingsi penting untuk sekularisasi di kemudian hari.

Ruang bicara dalam masyarakat Yunani kuno adalah *polis*, sementara orang-orang Eropa Abad Pertengahan memiliki alun-lun kota (*Platz, piazza, plaza*).

Kata *publicus* atau yang kita pakai dalam bahasa Indonesia yaitu ‘publik’ mengacu pada ‘umum, ‘terbuka’, ‘diumumkan’ dan sebagainya. Pengertian ruang publik sebagai lingkup spasial (*sphere*) yang menjadi *locus* partisipasi warganegara.

Dalam pandangan Habermas ruang publik berkaitan dengan aktivitas suatu komunitas bahasa, dan bahkan dengan

akal sehat manusia, maka ia sebuah ruang yang terbentuk lewat interaksi dan komunikasi sosial (Hardiman, 2010). Ruang publik adalah wahana di mana setiap kepentingan terungkap secara gamblang, setiap warga masyarakat memiliki akses yang sama untuk berpartisipasi, kemudian mereka terdorong untuk mendahulukan kepentingan bersama dan mencapai konsensus mengenai arah masyarakat tersebut ke depan dan menemukan solusi bersama dalam memecahkan permasalahan yang mereka hadapi. Dari apa yang dikemukakan di atas, kita bisa lihat bahwa ruang publik Habermas mengidealkan suatu ruang partisipatif emansipatoris.

## **2.2. Perpustakaan sebagai Ruang Publik**

Dari konsep-konsep ruang publik Habermas di atas, konsep tersebut bisa diaplikasikan pada perpustakaan mengingat perpustakaan adalah tempat unik, menarik, dalam hal relasi antara individu dan publik. Membaca adalah kegiatan yang sangat individual, sedangkan perpustakaan adalah kegiatan kebudayaan yang bersifat publik. Dalam gagasan masyarakat sebagai entitas

cerdas, perpustakaan menjadi salah satu lembaga penting untuk membangun "yang publik". Perpustakaan dengan kandungan informasi yang dimilikinya, bersentuhan langsung dengan wilayah publik.

Salah satu fungsi perpustakaan adalah fungsi informasional yaitu dalam penyediaan akses terhadap informasi secara bebas, demokratisasi informasi, dan konektifitas terhadap informasi global. Informasi adalah inti dari ruang publik pada lembaga informasi atau perpustakaan (Webster, 2006). Dengan kemampuan perpustakaan menyediakan informasi bagi perkembangan opini-opini independen, secara abstrak perpustakaan adalah ruang publik.

Sebagai sebuah ruang fisik, perpustakaan berupa gedung perpustakaan adalah sebuah tempat di mana orang-orang bisa berkumpul untuk mengadakan kegiatan-kegiatan seperti diskusi, bedah buku, seminar, dan lain sebagainya. Sebelum mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut tentu para peserta diskusi akan membekali diri mereka dengan informasi yang disediakan di perpustakaan. Ketika kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan di perpustakaan, telah terjadi sebuah interaksi secara luas,

sehingga secara fisik perpustakaan disebut sebagai ruang publik.

Cossette (2009) menyatakan bahwa perpustakaan adalah penyedia informasi yang bersifat netral atau tidak memihak suatu kelompok atau individu. Perpustakaan menyediakan informasi bagi semua warga tanpa memandang status sosial sehingga perpustakaan adalah lembaga yang mendukung ide demokrasi. British Library memberikan ide yang hampir sama dengan Cossette yaitu pengertian perpustakaan sebagai tempat mengumpulkan dan mengorganisasi informasi; tempat menciptakan akses agar pengetahuan menjadi lebih demokratis, dan menyimpan ide-ide yang terekam untuk generasi mendatang. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan perpustakaan meliputi pengadaan, pengolahan, pelestarian dan pelayanan berbagai sumber daya informasi. Kegiatan ini dilakukan untuk memudahkan pengguna perpustakaan dalam mengakses informasi sehingga perpustakaan sebagai tempat belajar seumur hidup bisa terwujud. Kegiatan belajar di perpustakaan melibatkan pengguna, koleksi perpustakaan, serta tempat membaca dan diskusi. Agar menjadi tempat belajar yang memadai,

perpustakaan harus mampu memberikan kenyamanan bagi penggunanya.

Dalam perspektif ruang publik, perpustakaan harus bersifat demokratis sehingga perpustakaan terbuka bagi siapa saja yang hendak memanfaatkan informasi yang dimilikinya, baik orang miskin, kaya, pejabat, pedagang, mahasiswa, dan lain-lain. Perpustakaan harus bisa menerima dan merespon masukan dan kritik dari pengguna sehingga perpustakaan bisa memenuhi kebutuhan pengguna/masyarakat. Perpustakaan juga harus mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi agar masyarakat pengguna tetap bisa menjadikan perpustakaan sebagai ruang publik karena selalu mampu menyediakan kebutuhan informasi pengguna. Untuk mempertahankan ruang publik perpustakaan, perpustakaan harus selalu introspeksi agar mampu menjadi tempat yang diidamkan oleh masyarakat serta tidak lupa melakukan promosi yang mengajak masyarakat gemar membaca.

### 3. KESIMPULAN

Perpustakaan sebagai lembaga penyedia informasi memiliki peranan yang sangat penting dalam perjalanan demokrasi. Perpustakaan merupakan kunci bagi penyediaan akses kepada pengetahuan, informasi dan ide-ide kepada setiap warga secara setara satu sama lain. Perpustakaan sebagai penyedia informasi yang tidak biasa, yang mendasarkan pluralisme atau keragaman sebagai landasan utama demokrasi. Dengan demikian, perpustakaan seharusnya menjamin tersediannya keragaman pendapat, sehingga tidak satu entitas pun dapat menyatakan dirinya sebagai pemegang kebenaran sejati.

Ruang publik Habermas adalah wahana di mana setiap kepentingan terungkap secara gamblang, setiap warga masyarakat memiliki akses yang sama untuk berpartisipasi, kemudian mereka terdorong untuk mendahulukan kepentingan bersama dan mencapai konsensus mengenai arah masyarakat tersebut ke depan dan menemukan solusi bersama dalam memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi.

Konsep perpustakaan dengan konsep ruang publik memiliki kesamaan ciri, sehingga perpustakaan sebagai ruang publik harus mampu mempertahankan eksistensinya sebagai lembaga penyedia informasi yang bersifat demokratis.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adian, Donny Gahral. 2011. *Setelah Marxisme Sejumlah Teori Ideologi Kontemporer*. Depok: Koekoesan.
- Asmini, Yuli. 2009. "Democracy and Library": Sebuah Catatan diunduh pada <http://isipii-librarian-indonesia.blogspot.com/2009/06/library-and-democracy-sebuah-catatan.html> tanggal 11 Nopember 2011.
- Buschman, John. 2005. *On Libraries and the Public Sphere*. Diunduh melalui <http://unllib.unl.edu/LPP/buschman.html> pada tanggal 9 Nopember 2011.
- Fashri, F. 2007. *Penyingkapan Kuasa Simbol Apropriasi Reflektif Pemikiran Pierre Bordieu*. Yogyakarta: Juxtapose
- Hardiman, F. Budi. 2010. "Komersialisasi Ruang Publik menurut Hannah Arend dan Jurgen Habermas" dalam *Ruang Publik Melacak "Partisipasi Demokratis" dari Polis sampai Cyberspace* [F.Budi Hardiman, ed]. Yogyakarta: Kanisius.
- McCarthy, Thomas. 2006. *Teori Kritis Jurgen habermas*. [Penerjemah: Nurhadi]. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- McCook, Kathleen de la Pena. 2004. *Sustaining the Public Sphere in Libraries*. <http://www.humanrightsproject.org/content.php?sec=essay&sub=sustaining> diunduh pada tanggal 9 Nopember 2011.
- Mutahir, A. 2011. *Intelektual Kolektif Pierre Bourdieu Sebuah Gerakan untuk Melawan Dominasi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Ritzer, G. & Douglas J. Goodman. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. [Penerjemah: Alimandan]
- Sumaryanto, Y. 2008. *Ruang Publik Jurgen Habermas dan Tinjauan Atas Perpustakaan Umum Indonesia*. (Tesis pada Jurusan Filsafat Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia tidak diterbitkan).
- Takwin, B. 2005. "Proyek Intelektual Pierre Bourdieu: Melacak Asal-usul Masyarakat, Melampaui Oposisi Biner dalam Ilmu Sosial". Dalam Harker, R., Mahar, C. dan Wilkes, C. (ed.). *(Habitus x Modal) + Ranah = Praktik Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*. [Penerjemah: P. Maizier]. Bandung: Jalasutra.



- Webster, Frank. 2006. *Theories of the Information Society third edition*. New York: Routledge.
- Wibowo, A. Setyo. 2010. “Kepublikan dan Keprivatan di Dalam Polis Yunani” dalam *Ruang Publik Melacak “Partisipasi Demokratis” dari Polis sampai Cyberspace* [F.Budi Hardiman, ed]. Yogyakarta: Kanisius.